

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. LkjIP merupakan bentuk komitmen nyata Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 menyajikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dengan menjabarkan program tersebut dalam kegiatan-kegiatan. Penilaian capaian program dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator. Dengan dukungan sumber daya, sarana prasarana dan keuangan yang ada, serta kebersamaan pimpinan dan staf yang harmonis, tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja ini secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sekaligus sebagai sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari masih ada kekurangan. Untuk itu segala sesuatu yang telah berjalan dengan baik akan dijaga dan ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Demikian LkjIP ini kami susun semoga dapat digunakan

sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 2019

KEPALA BIRO ADM.BANGDA

Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si

NIP. 19641024 199203 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

LkjIP merupakan bentuk komitmen nyata Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Sesuai dengan Tujuan ke 4 dalam RKPD Perubahan Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah ditetapkan tujuan utama yang hendak dicapai oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah yaitu "Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan". Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah menetapkan target sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dalam bentuk 3 sasaran strategis sbb :

- a. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.
- c. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2018, Biro Administrasi Pembangunan Daerah telah melaksanakan 2 program dengan 11 kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp.9.750.000.000,-. Sampai

dengan akhir Desember 2018 anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 9.535.815.096,- atau realisasi keuangannya sebesar 97,80 %.

Secara umum, pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan seluruhnya, dan berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) termasuk dalam kategori ***SANGAT BAIK***. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase rata-rata hasil PPS, yang berada pada nilai 132,30%. Namun demikian tentu ada permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya adalah frekuensi pekerjaan yang sangat padat, namun belum diimbangi dengan SDM dan sarana prasarana khususnya komputer dan internet yang memadai. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan mengoptimalkan SDM serta jam dan hari kerja maupun pelaksanaan tugas di luar hari kerja.

Semarang, 2019

KEPALA BIRO ADM.BANGDA

Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si

NIP. 19641024 199203 1 009

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Dalam rangka perwujudan *good governance* dan *clean government* itulah maka Biro Administrasi Pembangunan Daerah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun teknis penyusunan dan implementasi SAKIP mengacu pada Permen-pan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Administrasi Pembangunan Daerah berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan

bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

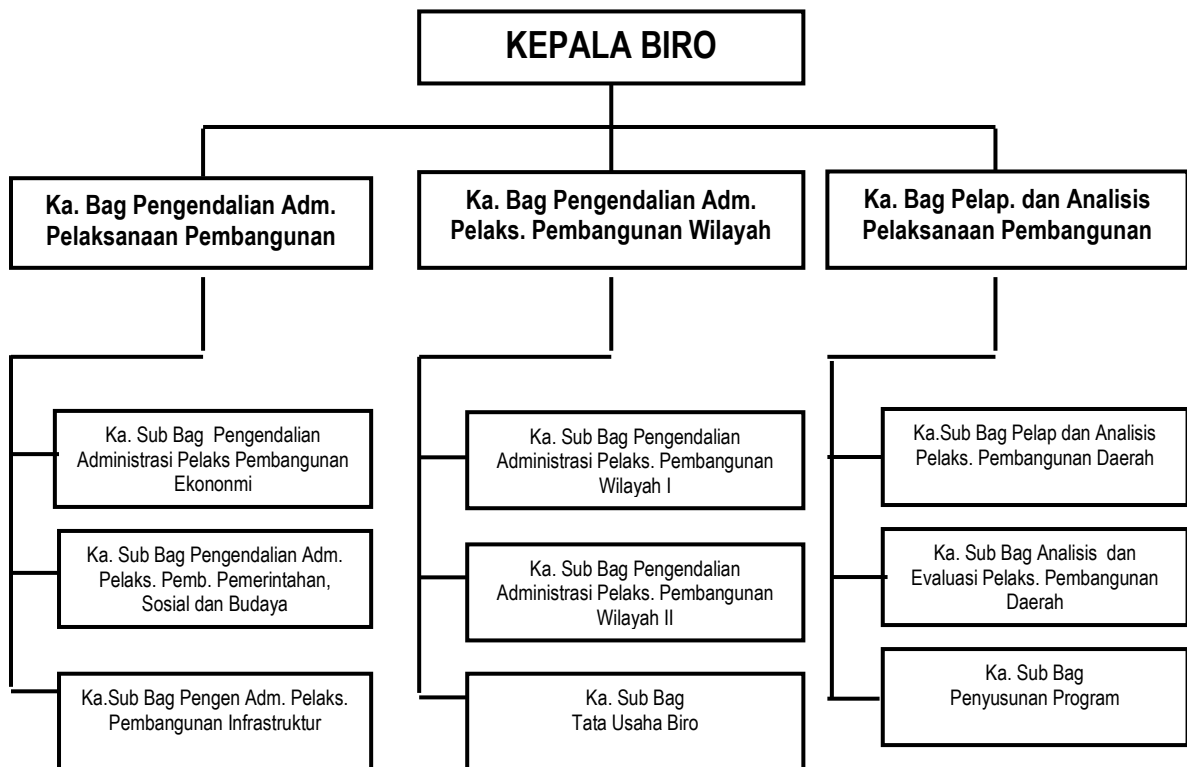
Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi
 - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;
2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
3. Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

c. Sub Bagian Penyusunan Program

BAGAN ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
(Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018)



Jumlah personalia di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 12 orang meliputi :

- 1) Eselon II.b : 1 Orang
- 2) Eselon III.a : 2 Orang
- 3) Eselon IV.a : 9 Orang

b. Jumlah staf sebanyak 25 orang.

Berdasarkan pangkat/golongan serta tingkat pendidikan, personil Biro Adm. Bangda adalah sebagai berikut :

a) Pangkat / Golongan Ruang

- Pembina Utama Muda : 1 orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : 2 Orang
- Pembina (IV/a) : 5 Orang
- Penata Tk. I (III/d) : 9 Orang
- Penata (III/c) : 6 Orang
- Penata Md Tk. I (III/b) : 11 Orang
- Penata Muda (III/a) : 1 Orang
- Pengatur (II/c) : 1 Orang
- Pengatur Muda (II/a) : 1 Orang

----- +
Jumlah : 37 Orang

b) Pendidikan

- Sarjana Strata 2 : 13 Orang
- Sarjana Strata 1 : 18 Orang
- Sarjana Muda : 1 Orang
- SMU/ sederajat : 4 Orang
- SD : 1 Orang

----- +
Jumlah : 37 Orang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. 3 (tiga) ruang rapat yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal.
2. Mesin Komputer sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah.
3. Printer sebanyak 20 buah
4. Laptop sebanyak 5 buah
5. 1 (satu) mesin telepon/fax

6. 3 (tiga) buah LCD,
7. 4 (empat) TV.
8. 8 (delapan) AC Split
9. 2 (dua) AC Portable

B. Fungsi Strategis Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Berdasarkan tupoksi tersebut diatas, maka Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi strategis yaitu melakukan : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

. Maka dari itu, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan adalah :

“Pelaksanaan APBD yang tertib administrasi, tepat waktu, dan tepat manfaat serta LKPJ Gubernur Jawa Tengah yang diterima baik oleh DPRD”

C. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Adapun permasalahan utama Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jateng yang harus diselesaikan dalam rangka pengendalian kinerja OPD Pemerintah dan penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan, OPD belum sepenuhnya mengacu pada RKO yang telah ditetapkan.
- Banyak OPD yang mengalami kesulitan dalam inputing data RKO dalam sistem *e-Project Planing* GRMS.
- Dalam hal penyusunan LKPJ Gubernur Jateng, terkendala dengan sinkronisasi dan penyelarasan data dari masing-masing OPD terkait

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai RKPD tahun berjalan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah yaitu untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, maka perlu dilakukan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2016. Rencana Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada tahun 2016 dituangkan ke dalam 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Program Administrasi Pelayanan Perkantoran; kemudian dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 9.750.000.000,-.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel. Biro Adm Bangda Serda Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
3. Rencana Kinerja Tahunan 2018.

1. RKPD Perubahan Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, perlu melihat kondisi global di tingkat nasional dan regional maupun program strategis nasional. Disamping itu, juga harus mengarah pada Visi dan Misi RPJMD yaitu:

***"MENUJU JAWA TENGAH YANG BERDIKARI, MBOTEN KORUPSI
MBOTEN NGAPUSI"***

Dan Misi :

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, *"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"*
- 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
- 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
- 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

1.2 Tujuan dan Sasaran RKPD Perubahan Setda Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama.
2. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan dan fasilitasi administrasi perancangan, penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
3. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan mental.
4. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
5. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD).
6. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam.
7. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
8. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, fasilitasi pelayanan rumah tangga setda, humas, protokol, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan.

Sedangkan sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Biro Adm Bangda dalam RKPD Perubahan Setda sesuai tujuan ke 4 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.
- c. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Adm. Bangda 2013-2018

Biro Adm. Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013-2018, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Biro Adm. Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.		
1.1 Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.	1) Jumlah paket Pengadaan Barang/ Jasa yang difasilitasi melalui ULP Provinsi Jateng	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak jumlah paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi melalui ULP Provinsi Jawa Tengah. Indikator ini dibutuhkan untuk mengetahui proses pengadaan barang & jasa yang belum/sudah selesai karena hal ini berhubungan dengan ketepatan SKPD dalam memulai suatu kegiatan agar sesuai dengan target yang telah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		ditentukan. • Formulasi Pengukuran : Jumlah paket Pengadaan Barang/ Jasa yang difasilitasi melalui ULP Provinsi Jateng pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng
	2) Persentase SKPD yang terkendali pelaksanaan APBDnya dengan ketepatan capaian realisasi fisik sesuai dengan target RKO.	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak SKPD yang capaian realisasi pelaksanaan APBD sesuai dengan target RKO. Indikator ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat tercapainya kesesuaian antara target dan realisasi fisik & keuangan pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jateng. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah SKPD yang mencapai target}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng
1.2 Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.	1) Persentase progres penyelesaian kegiatan yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuangan pada kab/kota	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penyelesaian kegiatan pada kab/kota yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuangan. Indikator ini penting untuk memantau perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		kab/kota. • Formulasi Pengukuran : <u>Realisasi Kegiatan yang selesai</u> x 100% Target Kegiatan • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Adm.Bangda
	2) Persentase usulan program pembangunan infrastruktur kab/kota yang difasilitasi	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui berapa persen usulan program pembangunan infrastruktur kab/kota yang sudah terfasilitasi. Indikator ini dibutuhkan khususnya sebagai dasar pengambilan kebijakan terhadap pembangunan infrastruktur di kab/kota. • Formulasi Pengukuran : <u>Realisasi proposal yang terfasilitasi</u> x 100% Jumlah usulan proposal • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
3. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.	1) Persentase SKPD yang pelaporan pelaksanaan APBD tepat waktu	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketepatan SKPD dalam melaporkan pelaksanaan APBD. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah SKPD yg pelaporannya tpt wktu}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng
	2) Persentase Kab/Kota yang pelaporan bantuan keuangannya tepat waktu	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketepatan kab/kota dalam melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kab/kota pelaporannya tpt wktu}}{\text{Jumlah kab/kota}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng
	3) LKPJ Gubernur Jateng	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penyelesaian LKPJ Gubernur Jateng. • Formulasi Pengukuran : Dokumen LKPJ Gubernur Jateng pada tahun berjalan • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Daerah Setda Prov.Jateng /BPS Prov.Jateng
	4) Persentase efektifitas pelaksanaan DAK pada SKPD penerima	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa efektifitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK pada SKPD Penerima. Indikator ini penting untuk memantau perkembangan pelaks. DAK. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Realisasi Kegiatan yang selesai}}{\text{Target Kegiatan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah secara lengkap sebagai berikut :

a. Target, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.	a.	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Difasilitasi Melalui ULP Provinsi Jawa Tengah	a. 350 paket
		b.	Presentase SKPD dengan ketepatan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	b. 80%
		c	Tercapainya Kesesuaian Antara Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Keg. APBD Prov. Jateng;	48 OPD
			Termonitornya Pelaksanaan APBD Prov. Jateng; dan Terkendalinya Pelaksanaan APBD Prov. Jateng	35 kab/kota
2.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.	a.	Progres Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota sesuai target	a. 80%
		b.	Persentase Terfasilitasinya Usulan Sinergitas Pembangunan di Daerah dari Kab/Kota	b. 80 %

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
		c	Jumlah Alat Tulis Kantor Biro Adm. Bangda	12 bulan
		d	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Baik Luar Maupun Dalam Daerah pada Biro Adm. Bangda	12 bulan
3.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.	a.	'Presentase SKPD dan Kabupaten/ Kota yang Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangannya Tepat Waktu	a. 80%
		b	Jumlah draft set buku Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng 2018	100 set
		c	Persentase efektifitas pelaksanaan DAK pada SKPD penerima	84 %
		d	Jumlah Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset yang Tersusun	4 dokumen

b. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penyelenggara Pemerintah Umum	Rp.7.227.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 9.260.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

4. Rencana Kinerja Tahun 2018

Dalam rencana kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, sasaran strategis, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

c. Target, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Rencana Kinerja Tahunan 2018 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.	a.	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Difasilitasi Melalui ULP Provinsi Jawa Tengah	a. 350 paket
		b.	Presentase SKPD dengan ketepatan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	b. 80%
		c	Tercapainya Kesesuaian Antara Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Keg. APBD Prov. Jateng;	48 OPD
			Termonitornya Pelaksanaan APBD Prov. Jateng; dan Terkendalinya Pelaksanaan APBD Prov. Jateng	35 kab/kota
2.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.	a.	Progres Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota sesuai target	a. 80%
		b.	Persentase Terfasilitasinya Usulan Sinergitas Pembangunan di Daerah dari Kab/Kota	b. 80 %

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
		c	Jumlah Alat Tulis Kantor Biro Adm. Bangda	12 bulan
		d	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Baik Luar Maupun Dalam Daerah pada Biro Adm. Bangda	12 bulan
3.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.	a.	'Presentase SKPD dan Kabupaten/ Kota yang Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangannya Tepat Waktu	a. 80%
		b	Jumlah draft set buku Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng 2018	100 set
		c	Persentase efektifitas pelaksanaan DAK pada SKPD penerima	84 %
		d	Jumlah Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset yang Tersusun	4 dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- > 100 = Sangat Baik
- 75 - 100 = Baik
- 55 - 74 = Cukup
- < 55 = Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan RKPD Perubahan Setda Provinsi Jateng 2013-2018, maka tujuan yang akan dicapai Biro Administrasi Pembangunan Daerah adalah : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

A.1. Sasaran – 1 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-1, sbb :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian 2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.	Presentase SKPD dengan ketepatan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	80 %	80 %	100	115.94	192.39 %
	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Difasilitasi Melalui ULP Provinsi Jawa Tengah	350 paket	817 paket	233	152	1732 paket
	Tercapainya Kesesuaian Antara Target dan Realisasi	48 OPD	48 OPD	100	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian 2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
	Fisik Pelaksanaan Keg. APBD Prov. Jateng;					
	Termonitornya Pelaksanaan APBD Prov. Jateng; dan Terkendalinya Pelaksanaan APBD Prov. Jateng	35kab/kota	35 kab/kota	100	-	-

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran I “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.” dapat **dicapai melebihi dengan target**. Untuk capaian kinerja indikator Jumlah paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi melalui ULP Prov. Jateng tercapai 233 %, ditargetkan 350 paket tercapai 817 paket.

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis I Tahun 2018 didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan SKPD dalam hal pelaksanaan pengendalian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp 6.150.000.000,- atau 63.08% dari total pagu sebesar Rp 9.750.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jateng
3. Kegiatan Sinergitas TEPR Provinsi Jateng dan Kab/Kota

A.2. Sasaran–2 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian Th2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.	Progres Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota sesuai target	a. 80%	80 %	100%	97.40%	98.70 %
	Persentase Terasilinasinya Usulan Sinergitas Pembangunan di Daerah dari Kab/Kota	b. 80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Alat Tulis Kantor Biro Adm. Bangda	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Baik Luar Maupun Dalam Daerah pada Biro Adm. Bangda	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran II “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah” **dapat dicapai sesuai dengan target.**

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis II Tahun 2018 ini didukung dengan melakukan pemantauan (monitoring) ke kab/kota sehingga bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selanjutnya ada penekanan kebijakan yang relevan dari Provinsi terkait pelaksanaan bantuan keuangan agar bisa berjalan dengan maksimal.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 1.515.000.000,- atau 15.54 % dari total pagu sebesar Rp 9.750.000.000,-

Pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
2. Kegiatan Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur kab/kota
3. Kegiatan Penyediaan ATK
4. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi di dalam dan luar daerah

A.3. Sasaran–3 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi	'Presentase SKPD dan Kabupaten/ Kota yang	87.89 %	94.08%	107.04%	94.08%	94.06%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.	Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangannya Tepat Waktu	80 %	80 %	100	100	
	Jumlah draft set buku Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng 2018	100 buku	100 buku	100	100 buku	500 set
	Persentase efektifitas pelaksanaan DAK pada SKPD penerima	84 %	84%	100	100%	108.70
	Jumlah Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset yang Tersusun	4 dokumen	4 dokumen	100	-	-

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran III “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan” dapat **dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.**

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis III Tahun 2018 didukung oleh koordinasi yang intensif dengan SKPD dan sistem pelaporan efektif efisien agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 2.085.000.000,- atau 21.38% dari total pagu sebesar Rp 9.750.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Analisis Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
2. Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng
3. Kegiatan Pemantauan dan Pemanfaatan Evaluasi DAK di Jateng
4. Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018, perlu dilakukan analisis dan evaluasi Akuntabilitas Keuangan, yaitu :

a. Target Pendapatan

Sesuai dengan Tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan atau sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga pada LkjIP Tahun 2018 tidak dilakukan analisis yang berdasarkan Target Pendapatan.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2018

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.750.000.000,- Sampai dengan akhir Desember 2018 anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 9.535.815.096 atau realisasi keuangannya sebesar 97.580 %. Seluruh anggaran di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan anggaran Belanja Langsung, karena anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi satu dengan Anggaran Belanja Tidak Langsung Setda Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel : Alokasi dan Realisasi APBD Provinsi Jateng Tahun 2017
Biro Adm. Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUA	
			(Rp)	%
1.	Pengendalian Pembangunan Daerah	800.000.000	791.799.500	98,97
2.	Peningkatan Dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	5.000.000.000	4.914.649.942	98.29
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK di Provinsi Jawa Tengah	300.000.000	285.876.180	95.29
4.	Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	850.000.000	838.599.295	98.66
5.	Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kab/Kota	175.000.000	124.790.578	71.31
6.	Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	670.000.000	667.361.750	99.61
7.	Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah	835.000.000	814.964.850	97.60
8.	Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	280.000.000	266.796.454	95.28
9.	Kegiatan Sinergitas TEPPRA Provinsi Jateng dan Kab/Kota	350.000.000	344.424.100	98.41
10.	Penyediaan ATK	40.000.000	39.984.900	99.59
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	450.000.000	446.717.547	99.27
	Jumlah	9.750.000.000	9.535.815.096	97.80

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori **SANGAT BAIK**. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 120,00%.

Efisiensi anggaran dari kegiatan yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 adalah sebesar 2.20% atau senilai Rp214.184.904,- . Hal ini menunjukkan adanya tingkat penggunaan anggaran yang sesuai dengan RKO yang berdasarkan pada asas manfaat dan tepat sasaran.

B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya adalah frekuensi pekerjaan yang sangat padat, dalam hal pengendalian dan pelaporan kinerja SKPD seringkali ditemui sinkronisasi data yang tidak sesuai dengan target dalam perencanaan yang telah ditetapkan.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan pekerjaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja maupun di luar hari kerja. Selain itu juga diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan SKPD dalam rangka pengendalian dan pelaporan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, 2018

